

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan ekonomi ini dapat dilihat melalui beberapa indikator perekonomian salah satunya melalui angka pengangguran.

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan penyerapan terhadap tenaga kerja. Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Oleh sebab itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan, karena dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, maka akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% ( $10\% : 4$ ), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% ( $10\% : 12$ )<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rahardja Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, p 36

Laporan Badan Pusat Statistik menyatakan, tingkat inflasi Maret 2013 mencapai 0,63%, angka yang sangat tinggi dibanding inflasi pada bulan yang sama tahun 2012 (0,07%) dan 2011 (minus 0,31%). Total inflasi Januari-Maret 2013 mencapai 2,43%, adapun target inflasi tahun 2013 adalah 4,9%. Hal itu mengindikasikan setengah dari target inflasi terpenuhi hanya dalam 3 bulan, dan kita berharap inflasi tahun 2013 tidak melampaui target karena merugikan perkembangan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Tingkat inflasi tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi semakin mengecil. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang.<sup>3</sup> Karena, untuk berkembang membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat dan hal ini akan sangat mempengaruhi kesempatan kerja. Dalam jangka pendek, tingginya tingkat inflasi juga akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini akan membuat produsen juga menurunkan tingkat produksinya karena biaya yang dipakai untuk produksi juga bertambah, akan tetapi penjualannya akan berkurang sehingga keuntungan yang di peroleh produsen akan berkurang pula. Turunnya tingkat produksi akan membuat tenaga kerja yang di pakai semakin sedikit dan akan menyebabkan jumlah angkatan kerja yang terserap tidak bertambah karena

---

<sup>2</sup> <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/04/09/221133> diakses pada tanggal 08 Maret 2014 pukul 07.36

<sup>3</sup> Sibubung, *Dampak Inflasi dan Penggangguran Terhadap Perekonomian* (<http://akuntansibubung.wordpress.com/2012/04/04/dampak-inflasi-dan-%E2%80%8Epenggangguran-terhadap-%E2%80%8E-perekonomian/>) diakses pada tanggal 06 maret 2014 pukul 18.59

situasi ini akan membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya dalam rangka melakukan perluasan atau pendirian industri baru.

Inflasi juga bersumber dari ketidakmampuan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan produksi mereka dengan cepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perubahan-perubahan dalam permintaan. Sektor yang paling tidak mampu menambah produksi untuk memenuhi pertambahan permintaan atas barang-barang yang dihasilkannya adalah sektor pertanian. Sebab, penduduk terus bertambah dan terjadinya perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke kota untuk bekerja di sektor industri akan menaikkan permintaan atas bahan makanan, sedangkan produktivitas dari sektor pertanian semakin berkurang. Akibatnya, harga bahan makanan akan naik dan akan menimbulkan tuntutan untuk menaikkan tingkat upah di sektor industry. Hal ini menyebabkan biaya produksi di sektor industri akan naik pula dan membuat barang industri mengalami kenaikan pula.

Jumlah usaha kecil menengah yang belum bisa memenuhi target membuat kesempatan kerja semakin sempit karena angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di perusahaan karena alasan tertentu, seperti tingkat pendidikan dan kemampuannya rendah tidak dapat terserap pula oleh UKM. Kurangnya jumlah UKM disebabkan masalah permodalan, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan

lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil menengah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis<sup>4</sup>.

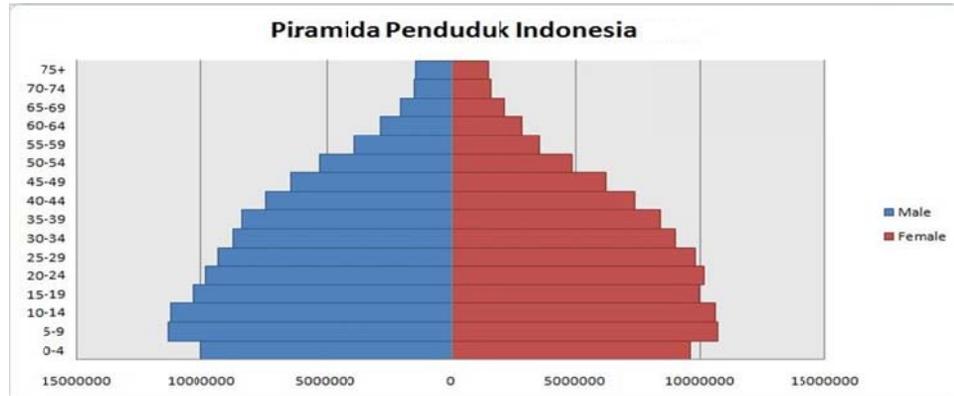
Meningkatnya angka pengangguran juga disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja, sehingga angkatan kerja yang terserap hanya sedikit dan hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian

---

<sup>4</sup> Fit Zakiyya, *Pengaruh Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Indonesia Bila Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Teknik*, <http://fitzakiyya23.blogspot.com/2012/06/pengaruh-kredit-usaha-kecil-menengah.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014 Pukul 07.52

penyerapan tenaga kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak. Pada dasarnya tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan.

Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 5,92 persen pada bulan Maret di tahun 2013.<sup>5</sup> Namun, angka tersebut masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura sebesar 3,1 persen dan 1,8 persen. Pengangguran ini timbul karena jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun, akibatnya jumlah angkatan kerja bertambah dan tentunya akan memberi makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia lebih kecil.<sup>6</sup>



**Gambar I.1**

### **Piramida Penduduk**

<sup>5</sup>Pertumbuhan RI capai angka tertinggi. 2013.

([http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/08/130816\\_rapbn\\_2014\\_sby.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_rapbn_2014_sby.shtml)), diakses tanggal 24 Maret 2014

<sup>6</sup>Siestri Pristina Kairupan, "Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012", *Jurnal Emba* Vol.1 No.4 Desember 2013, p 2207

Menurut gambar I.1 penduduk di Indonesia berdasarkan piramida penduduknya, di dominasi oleh penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia adalah angkatan kerja.

Sebenarnya penambahan angkatan kerja dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong bagi pembangunan ekonomi karena angkatan kerja yang bertambah akan mendorong bertambahnya jumlah lapangan kerja dan juga memperbesar jumlah tenaga kerja yang ada dan penambahan tersebut memungkinkan suatu negara menambah jumlah produksinya. Dengan beberapa fungsi ini maka angkatan kerja bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi tetapi yang lebih penting lagi angkatan kerja merupakan unsur yang menciptakan dan mengembangkan teknologi dan yang mengorganisasi penggunaan berbagai faktor produksi. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak dapat disangkal lagi bahwa ini merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan, terlebih untuk Negara berkembang, seperti Indonesia. Sejauh ini angkatan kerja di Indonesia belum secara optimal dalam mengorganisasi berbagai faktor produksi, serta dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, besarnya jumlah angkatan kerja dan kekuatan ekonomi masyarakat menjadi potensi sekaligus sasaran pembangunan sosial ekonomi, baik untuk skala nasional maupun internasional. Berdasarkan hal ini pengembangan sumber daya manusia perlu terus

ditingkatkan agar kualitas angkatan kerja sebagai pelaku ekonomi dapat meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja, disatu pihak menuntut jumlah penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan *output* yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap tinggal landas.

Erat kaitannya dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, maka harus ada upaya untuk lebih pemeratakan persebaran penduduk. Saat ini kebanyakan penduduk tinggal di pulau jawa yang luasnya hanya 7% dari luas daratan Indonesia. Dengan demikian, sumber daya ekonomi dan daya dukung alam di pulau jawa akan semakin terbatas. Sebaliknya, di luar pulau jawa banyak potensi ekonomi yang belum digunakan secara optimal. Keputusan penduduk untuk pindah ke suatu daerah terutama dilandasi oleh motif ekonomi, maka untuk mendorong transmigrasi secara mandiri prioritas harus lebih diberikan kepada pemukiman-pemukiman baru terkait dengan pembukaan dan pengembangan daerah produksi serta komoditas-komoditas unggulan. Oleh sebab itu, berbagai upaya harus diarahkan untuk menarik dan mendorong penyebaran penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing di daerah.<sup>7</sup>

Jumlah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tingginya tingkat upah yang

---

<sup>7</sup> Kartasmita Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996, pp 321-322

harus dibayarkan oleh para pengusaha membuat pengusaha akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan mesin untuk memproduksi, karena kenaikan upah tidak berbanding dengan bertambahnya produktifitas pekerjaanya.

Kebijakan tingkat upah pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Penetapan tingkat upah didasarkan pada rumusan-rumusan dasar tertentu dan faktor lainnya<sup>8</sup>. Paling tidak ada 5 (lima) faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, yaitu; kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK) atau tingkat inflasi, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, dan tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat. Bila tingkat upah telah ditetapkan, maka pengusaha minimal harus membayar sesuai dengan tingkat upah tersebut, tetapi tidak harus berhenti disitu. Sejalan dengan kemajuan perusahaan, maka upah pekerja harus ditingkatkan. Sebaliknya, tuntutan peningkatan yang terlalu cepat dibanding produktivitas menjadikan proses produksi tidak efisien. Akibatnya, pengusaha akan cenderung menggunakan teknologi produksi yang

---

<sup>8</sup> Rini Sulistiawati, " Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", *Jurnal EKSOS* Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, p 197

padat modal, yang pada gilirannya akan semakin mempersempit penyediaan lapangan kerja secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Setiap tahunnya tuntutan dan aspirasi buruh selalu diteriakkan lewat media perjuangan mereka yaitu melalui serikat buruh yang mewakili kepentingan mereka. Dalam menentukan tingkat upah pihak-pihak sebagai pelaku penerima pekerjaan (buruh) dan pemberi pekerjaan (pengusaha) memiliki pandangan yang berbeda. Bagi pengusaha, upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tingkat upah mereka sangat berhati-hati. Sedangkan bagi buruh, upah merupakan sumber pendapatan, sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan upah.<sup>10</sup>

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Januari 2014 tingginya upah minimum membuat 5 perusahaan pergi secara diam-diam. Sementara itu, 20 pabrik di Tangerang serta 40 pabrik di Bekasi terancam gulung tikar<sup>11</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat upah yang diatur oleh pemerintah Indonesia telah memberatkan para pengusaha, sehingga mereka melarikan usahanya ke Negara lain yang upah minimumnya lebih rendah, seperti China dan Vietnam. Menurut data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), upah pekerja di Indonesia mencapai 1,03 dollar AS (Rp 9.888) per jam. Adapun upah pekerja di China 0,91 dollar AS (Rp 8.736) per jam, Vietnam 0,46 dollar AS (Rp 4.416) per jam, dan Kamboja 0,29 dollar AS (Rp 2.784) per jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah buruh di Indonesia sudah tidak rendah lagi dan tuntutan buruh yang menginginkan upah naik pada 2014 telah membuat Indonesia kehilangan lagi kesempatan kerja, karena kenaikan upah minimum

---

<sup>9</sup> Kartasasmita Ginanjar, *op.cit*, p. 325

<sup>10</sup> Tono, *Pengusaha, Buruh dan Perbaikan Upah*, (<http://id.voi.co.id/voi-komentar/4679-pengusaha-buruh-dan-perbaikan-upah>), diakses tanggal 20 Maret 2014

<sup>11</sup> Ilham Tirta, "Masalah Upah Diam-Diam 5 Perusahaan Henggang", *Tempo.Co*, Kamis 23 Januari 2014

provinsi di Jawa Barat telah naik 18%, sehingga banyak pengusaha yang melarikan usahanya ke wilayah lain.<sup>12</sup>

Investasi yang tidak berkembang dari waktu ke waktu membuat tenaga kerja yang terserap akan semakin sempit, karena investasi akan mempengaruhi barang modal yang tersedia. Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi, tenaga kerja yang merupakan faktor produksi otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Investasi akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui dua sisi. Pengaruh substitutif, dimana bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh komplementer, dimana bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia<sup>13</sup>.

Menurut Pelaksana Tugas (PIT) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi lantaran investasi yang masuk kebanyakan berupa investasi padat modal.<sup>14</sup> Sejalan dengan apa yang disampaikan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi mengatakan terus menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor industri disebabkan sedikitnya investor sektor industri padat karya yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar investor takut masuk ke Indonesia lantaran banyaknya hambatan yang dihadapi, mulai dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga gas industri, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Gloriacharlotte, *Tuntutan Upah BUruh di Jakarta Merugikan Banyak Pihak*, (<http://gloriacharlotte.wordpress.com/2013/11/02/tuntutan-upah-buruh-di-jakarta-merugikan-banyak-pihak/>) diakses pada Tanggal 20 Maret Pukul 10.04

<sup>13</sup> Ni Putu Sucitrawati, "Pengaruh Inflasi, Investasi, Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, p 53

<sup>14</sup> Rachman, *Tren Penurunan Penyerapan Tenaga Kerja Berlanjut*, 2013, ([sinarharapan.co/index.php/news/read/15035/tren-penurunan-penyerapan-tenaga-kerja-berlanjut.html](http://sinarharapan.co/index.php/news/read/15035/tren-penurunan-penyerapan-tenaga-kerja-berlanjut.html)), diakses tanggal 24 Maret 2014

<sup>15</sup> Riendy Astria, *Industri padat Karya Sepi Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja Minim*, 2014, ([m.bisnis.com/industri/read/20140128/257/199876/industri-padat-karya-sepi-investasi-penyerapan-tenaga-kerja-minim](http://m.bisnis.com/industri/read/20140128/257/199876/industri-padat-karya-sepi-investasi-penyerapan-tenaga-kerja-minim)), diakses tanggal 24 Maret 2014

Dana investasi yang sudah tersalurkan juga harus diarahkan untuk menjamin pertumbuhan kesempatan kerja yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, dana investasi harus makin meluas dan merata agar jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak pada daerah lainnya. Ketersediaan dana investasi yang bersaing harus mampu merangsang pertumbuhan daerah-daerah yang terbelakang dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membatasi masalah pada “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah terhadap pengaruh antara inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara usaha kecil menengah dengan penyerapan tenaga kerja ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja ?

---

<sup>16</sup> Kartasmita Ginanjar, *Op.cit* p 330

4. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja ?
5. Apakah terdapat pengaruh antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pada kenyataannya masalah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang luas. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada “ Pengaruh jumlah angkatan kerja dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia tahun 2006 hingga 2013”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibuat maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia ?

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang angkatan kerja, tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan angkatan kerja, maupun tingkat upah.